

## **Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwuk Timur**

**Syarah Monika**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
*syrhmoniika@gmail.com*

**Muchriana Muchran**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
*muchriana@unismuh.ac.id*

**Nasrullah**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
*nasrullah@unismuh.ac.id*

### **Abstract**

*This study aims to examine whether the presentation of regional financial reports, accessibility of regional financial reports, and internal control affect the transparency of regional financial management in East Luwu Regency. This study used a type of quantitative research originating from primary and secondary data, by distributing questionnaires to all staff/employees at the East Luwu Regency BKAD office as many as 38 employees. The analytical methods used in this study are validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression analysis test, and hypothesis testing with the Coefficient of Determination Test (R<sup>2</sup>) and t test (Partial Test). The results of this study indicate that: 1) Presentation of regional financial reports has no positive and significant effect on the transparency of regional financial management. 2) The accessibility of regional financial reports has a positive and significant effect on the transparency of regional financial management. 3) Internal control has no positive and significant effect on the transparency of regional financial management.*

**Keywords :** *Presentation of Financial Statements, Accessibility of Financial Statements, Internal Control.*

### **A. PENDAHULUAN**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, terutama terhadap perwujudan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Sari, 2012).

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang aktivitasnya memberikan pelayanan kepada publik, di mana visinya adalah Kabupaten Luwu Timur Terkemuka 2021. Salah satu misinya adalah mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini dilihat bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur selama 4 tahun terakhir masih rendah dengan penilaian C atau agak kurang khususnya untuk tahun 2015 dan 2016, sedangkan penggunaan anggaran pada tahun 2017 dan 2018 dengan penilaian CC atau cukup baik, namun hal ini tidak seimbang dengan capaian kinerja yang dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur (Achmad et al., 2021).

Adapun fenomena yang melatar belakangi sehingga peneliti mengangkat judul mengenai Pengaruh Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur, dimana berdasarkan Undang-undang tertulis bahwa pengelolaan manajemen keuangan daerah harus berpegang pada azas umum yaitu harus dilaksanakan dengan taat akan peraturan dari undang-undang yang sudah dibuat, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas manfaat bagi masyarakat dan keadilan (Pamungkas, 2013:2). Namun peristiwa yang sudah terjadi akan menimbulkan berbagai masalah yang muncul karena adanya kesalahan dari pengelolaan dari manajemen keuangan daerah yang kurang baik seperti penggunaan alokasi dana atau dana belanja yang dianggarkan atau digunakan secara tidak tepat, anggaran yang diserap dengan tidak maksimal dan rasa tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tidak relevan dan ada hal lain yang menyebabkan hak masyarakat di berbagai daerah tidak terpenuhi dengan baik dan sering diabaikan, tidak bisa dipungkiri bahwa ini sudah terjadi di beberapa daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Luwu Timur.

Pekerjaan pemerintahan bisa dibilang cukup banyak, seperti pembangunan dan pelayanan publik yang ada di salah satu otonom di Provinsi Sulawesi Selatan adalah pemerintah di Kabupaten Luwu Timur. Maka dari itu informasi terkait bagaimana mengatur keuangan yang dihasilkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Luwu Timur haruslah memiliki sifat yang terbuka dan mudah dijangkau oleh berbagai elemen masyarakat agar masyarakat sendiri bisa berperan dalam proses pengelolaan keuangan yang terpercaya serta transparan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi komunikasi publik yang termasuk dalam prinsip

transparansi belum diterapkan dalam banyak aktivitas pemerintahan. Masyarakat belum tentu dapat mengakses dengan mudah walaupun informasi tersebut sudah dimuat oleh media masa. Adanya salah satu aspek dari kualitas manajemen keuangan yang bertingkat daerah adalah salah satu sebab yang bisa menjadi pengaruh dari sebuah kata transparansi pengelolaan keuangan di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini sangat urgent atau penting dilakukan agar sikap transparansi dalam pengelolaan keuangan berdasarkan aspek manajemen dapat mewujudkan *good government governance* yang bertujuan untuk mengurangi dari kegiatan yang menyimpang sehingga merugikan masyarakat secara luas, hal ini bisa dikatakan sebagai pencegahan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam mengetahui cara penggunaan anggaran secara semestinya. Oleh karena itu manajemen keuangan pemerintah haruslah secara aktif maupun pasif agar bisa menjadi anggaran daerah efektif dan akuntabel yang bisa menjadi harapan pada saat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang terpercaya dalam memenuhi hak-hak masyarakat itu sendiri.

## **B. METODE**

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kuantitatif, Menurut sugiyono (2019), metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme,

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur, Jln Puncak Indah, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan yakni pada bulan Maret sampai dengan April 2023.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017) dalam (Susanto, 2019). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua pegawai Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu (Seviani & Budiwinarto, 2021). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh staf/pegawai di kantor BKAD Kabupaten Luwu Timur sebanyak 38 pegawai.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Kuesioner/ Angket merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada para responden untuk dijawab.
- b. Observasi/ pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat langsung dilokasi penelitian tersebut berada.
- c. Studi dokumen yaitu melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang diberikan berupa laporan-laporan keuangan daerah, dan dokumen profil instansi untuk memahami tugas dan tanggungjawab instansi

### 5. Metode Analisis Data

#### a. Uji Kualitas Data

##### 1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2015;52) Pengujian ini menggunakan metode *Korelasi Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) yaitu untuk membuktikan keberadaan hubungan antara dua variabel.

##### 2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas ini menggunakan Teknik *Cronbach's alpha*( $\alpha$ ). Kriteria suatu instrument penelitian dikatakan reliabel dengan menggunakan Teknik ini, bila koefisien reliabilitas( $r_i$ )>0,6 (Ghozali,2011;48).

#### b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independent (*Explanatory*) terhadap satu variabel dependen. Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut:

c. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar koefisien determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2011:97).

2) Uji Statistik t

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Tingkat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 95% atau signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ). Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel, jika t hitung besar tabel maka  $H_0$  tidak terdukung dan  $H_a$  terdukung demikian juga sebaliknya.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**1. Uji Kualitas Data**

a. Uji Validasi

**Tabel 1 Hasil Uji Validasi Penyajian Laporan Keuangan**

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X1.1	0,320	. 586	Valid
X1.2	0,320	. 598	Valid
X1.3	0,320	. 504	Valid
X1.4	0,320	.577	Valid
X1.5	0,320	. 585	Valid
X1.6	0,320	.808	Valid
X1.7	0,320	.640	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk X1.1 sebesar 0,586, X1.2 sebesar 0,598, X1.3 sebesar 0,504, X1.4 sebesar 0,577, X1.5 sebesar 0,585, dan X1.6 sebesar 0,808, X1.7 sebesar 0,640.

**Tabel 2 Hasil Uji Validasi Aksesibilitas Laporan Keuangan**

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X2.1	0,320	.578	Valid
X2.2	0,320	.409	Valid
X2.3	0,320	.563	Valid
X2.4	0,320	.437	Valid
X2.5	0,320	.394	Valid
X2.6	0,320	.557	Valid
X2.7	0,320	.578	Valid
X2.8	0,320	.489	Valid
X2.9	0,320	.557	Valid
X2.10	0,320	.563	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Aksesibilitas Laporan Keuangan dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk X2.1 sebesar 0,578, X2.2 sebesar 0,409, X2.3 sebesar 0,563, X2.4 sebesar 0,437, X2.5 sebesar 0,394, X2.6 sebesar 0,557, X2.7 sebesar 0,578, X2.8 sebesar 0,489, X2.9 sebesar 0,557, X2.10 sebesar 0,563.

**Tabel 3 Hasil Uji Validasi Pengendalian internal**

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
X3.1	0,320	.329	Valid
X3.2	0,320	.603	Valid
X3.3	0,320	.600	Valid
X3.4	0,320	.522	Valid
X3.5	0,320	.454	Valid
X3.6	0,320	.522	Valid
X3.7	0,320	.528	Valid
X3.8	0,320	.441	Valid
X3.9	0,320	.605	Valid
X3.10	0,320	.754	Valid
X3.11	0,320	.560	Valid
X3.12	0,320	.502	Valid

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Pengendalian Internal dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320. Sedangkan nilai r hitung untuk X3.1 sebesar 0,329, X3.2 sebesar 0,603, X3.3 sebesar 0,600, X3.4 sebesar 0,522, X3.5 sebesar 0,454, X3.6 sebesar 0,522, X3.7 sebesar 0,528, X3.8 sebesar

0,441, X3.9 sebesar 0,605, X3.10 sebesar 0,754, X3.11 sebesar 0,560, X3.12 sebesar 0,502.

**Tabel 4 Hasil Uji Validasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah**

Variabel	Nilai r Tabel	Nilai r Hitung	Keterangan
Y.1	0,320	. 664	Valid
Y.2	0,320	. 489	Valid
Y.3	0,320	. 685	Valid
Y.4	0,320	.335	Valid
Y.5	0,320	. 458	Valid
Y.6	0,320	.418	Valid
Y.7	0,320	.443	Valid
Y.8	0,320	.717	Valid

*Sumber : Data diolah SPSS Versi 24*

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa semua indikator yang digunakan pada variabel penelitian mengenai Penyajian Laporan Keuangan Daerah dikatakan valid karena nilai r hitung > nilai r tabel. Nilai r tabel sebesar 0,320, sedangkan nilai r hitung untuk Y.1 sebesar 0,664, Y.2 sebesar 0,489, Y.3 sebesar 0,685, Y.4 sebesar 0,335, Y.5 sebesar 0,458, dan Y.6 sebesar 0,418, Y.7 sebesar 0,443, Y.8 sebesar 0,717.

b. Uji Realibilitas

**Tabel 5 Hasil Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Tingkat Signifikan	Keterangan
Penyajian Laporan Keuangan Daerah	0.722	0,60	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.685	0,60	Reliabel
Pengendalian Internal	0.766	0,60	Relibael
Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	0,633	0,60	Reliabel

*Sumber : Data diolah SPSS Versi 24*

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa, nilai cronbach's alpha yang pada Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar 0,722, Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar 0,685, Variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,766, dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,633.

Berdasarkan pengambilan keputusan maka dapat disimpulkan bahwa Varibel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1), variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Variabel Pengendalian Internal (X3), dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dikatakan Reliabel karna memenuhi syarat pengambilan keputusan nilai cronbach alpha diatas 0,6.

## 2. Uji Analisis regresi linier berganda

**Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.023	.053	.037	.428	.671
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	.172	.082	.204	2.104	.043
	Pengendalian Internal	.486	.063	.750	7.727	.000

a. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : Data diolah SPSS Versi 24

Pada tabel 4.9 menunjukkan persamaan regresi linear berganda berikut ini :

$$Y = 1.772 + 0,23X_1 + 0,172X_2 + 0,486X_3$$

- a. (a) Konstanta sebesar 1.772, yang artinya jika Penyajian Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>) dan Pengendalian Internal (X<sub>3</sub>) atau Konstanta X=0 maka nilai a konstanta sebesar 1.772
- b. (b<sub>1</sub>) Koefisien Penyajian Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>) sebesar 0,023, artinya jika Penyajian Laporan Keuangan mengalami peningkatan sebanyak 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,023, dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Penyajian Laporan Keuangan (X<sub>1</sub>) dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
- c. (b<sub>2</sub>) Koefisien Regresi Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>) sebesar 0.172 artinya jika Aksesibilitas Laporan Keuangan meningkat 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,172 dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X<sub>2</sub>) dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
- d. (b<sub>3</sub>) Koefisien Regresi Variabel Pengendalian Internal (X<sub>3</sub>) sebesar 0.486 artinya jika Pengendalian Internal meningkat 1%, maka variable Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,486 dan bernilai positif yang artinya terjadi hubungan positif antara variabel Pengendalian Internal (X<sub>3</sub>) dan Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

**Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.862 <sup>a</sup>	.743	.720	1.15198
A. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan				

Sumber : Data diolah SPSS versi 24

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,720 artinya besarnya pengaruh dari penyajian laporan Keuangan Daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, pengendalian internal, sebesar 50% sisanya sebesar 50% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

#### b. Uji Statistik t

**Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.772	3.936		.450	.655
	Penyajian Laporan Keuangan Daerah	.023	.053	.037	.428	.671
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	.172	.082	.204	2.104	.043
	Pengendalian Internal	.486	.063	.750	7.727	.000
A. Dependent Variable: Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah						

Sumber : Data diolah SPSS versi 24

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai t hitung pada variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar 0.428 < nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.671 > 0.05, untuk variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) nilai t hitung sebesar 2.104 > nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.043 < 0.05 sedangkan untuk variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 7.727 > nilai t tabel yaitu 2.03224 dan nilai signifikansinya sebesar 0.000 < 0.05.

Berdasarkan pengambilan keputusan pada uji t disimpulkan bahwa Hipotesis pertama yang diajukan oleh peneliti tidak diterima dalam artian pada variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) tidak berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap variabel Transparansi Pengelolaan

Keuangan Daerah (Y), dan Hipotesis kedua diterima dalam artian pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sedangkan Hipotesis ketiga diterima dalam artian pada variabel Pengendalian Internal (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).

### ***Pembahasan***

#### 1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung pada variabel penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) sebesar  $0.428 < \text{nilai } t \text{ tabel yaitu } 2.03224$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0.671 > 0.05$ . Artinya variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga tidak mendukung perumusan hipotesis 1 yaitu penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi dalam grand theory, dengan adanya tuntutan dari pihak eksternal seperti pihak Investor maupun kreditor untuk tujuan pertumbuhan keuangan suatu instansi pemerintah sebagai bahan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan, sehingga dalam penyajian laporan keuangan yang diperoleh belum seagut dan selengkap mungkin sesuai standar akuntansi, agar mudah untuk dipahami oleh penggunanya.

Penelitian ini diindikasikan bahwa penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur melibatkan satuan kerja lain seperti yang telah dijelaskan pada grand theory yaitu teori kontingensi. Bagi Kabupaten luwu timur, penyajian laporan keuangan saat ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur karena juga diindikasikan adanya SDM dari unit lain selain yang berperan aktif dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dominikus Ledo & Sri Ayem (2017) yang hasilnya menunjukkan Penyajian Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Artini & Putra (2020) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah di BPKPD Kabupaten Klungkung.

#### 2. Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung

pada variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2) sebesar  $2.104 >$  nilai t tabel yaitu  $2.03224$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0.043 < 0.05$ . Artinya variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga mendukung perumusan hipotesis 2 bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi dalam grand theory, aksesibilitas merupakan kemudahan dalam mengakses dan memperoleh informasi laporan keuangan yang dibuat oleh unit pemerintah sebagai agen yang diberi kewenangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para pengguna informasi keuangan pemerintah.

Penelitian ini diindikasikan bahwa aksesibilitas dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten luwu timur seperti kemudahan para pegawai dalam mengakses laporan keuangan daerah sebagai salah satu bukti akan terciptanya transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kurniawan & Rahayu (2019) yang hasilnya menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Befiriana Moniza (2021) yang hasilnya menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas mempunyai tingkat signifikan  $0,127 > 0,05$  dan thitung sebesar  $-1,553$  lebih kecil dibandingkan ttabel sebesar  $2,01290$  atau dapat dikatakan variabel aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan.

### 3. Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Uji Parsial (Uji t), menunjukkan nilai t hitung pada variabel Pengendalian Internal (X3) sebesar  $7.727 >$  nilai t tabel yaitu  $2.03224$  dan nilai signifikansinya sebesar  $0.000 < 0.05$ . Artinya variabel Pengendalian Internal (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Y), sehingga mendukung perumusan hipotesis 3 bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori kontingensi dalam grand theory, Pengendalian Internal tergantung pada konteks organisasi di mana pengendalian tersebut dilaksanakan. Didalam kepentingan pemerintahan daerah, pengendalian internal dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh yang

dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati yang sifatnya wajib agar tercapai pengendalian internal yang bersifat transparansi.

Penelitian ini diindikasikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan sudah baik, yang dimana Kabupaten Luwu Timur dalam meminimalkan segala hal dalam transparansi penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan yang secara langsung mempengaruhi transparansi Laporan Keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dominikus Ledo & Sri Ayem (2017) yang hasilnya menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Oktavia & Aliyah (2022) yang hasilnya menunjukkan bahwa Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Akuntabilitas, Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Faktor Politik, Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

#### **D. SIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini berdasarkan hasil uji t yang digunakan, yaitu sebagai berikut:, Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pengendalian internal tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional*, 718–727.
- Seviani, P., & Budiwinarto, K. (2021). Surakarta Accounting Review ( SAREV ). *Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 3(2), 89–100.
- Aliyah, Siti ; Nahar, A. (2012). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Siti Aliyah Aida Nahar. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2), 97–189.
- Afriady. (2022). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Penghargaan, Sanksi Dan Religiusitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Accounthink: Journal of Accounting and Finance*, 6(02), 181–193.
- Anwar, A., & Mane, A. (2022). *1490-Article Text-7204-1-10-20220731*. 4(2), 110–121.
- Artini, N. L. W., & Putra, I. P. D. S. (2020). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah,

aksesibilitas laporan keuangan dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 188–218.

- BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia. *Demographic Research*, 4–7.
- Defitri, S. Y. (2022). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Opd Di Kota Solok). *Jurnal Ekonomia*, 12(1), 58–72.
- Dewi, S. P. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Spbu Yogyakarta. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(9), 1689–1699.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 53(9), 1689–1699.
- Hastuti, A. I. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Boyolali. *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2013–2015.
- Hehanussa, S. J. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon Salomi*. 2, 82–90.
- Ikbal, M., Ekonomi, F., & Mulawarman, U. (2022). Volume . 18 Issue 4 ( 2022 ) Pages 831-839 *INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN : 0216-7786 ( Print ) 2528-1097 ( Online ) Mengelola persaingan menuju pencapaian kinerja perusahaan perbankan yang berdaya saing Managing competition toward*. 18(4), 831–839.
- Kosanke, R. M. (2019). *Teori Kontingensi dan Efek Mediasi*.
- Moniza, Befiriana. (2021). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan. Skripsi. Universitas Islam Negeri:Sumatera Utara
- Muchran, M., Winarsih, E., & (2021), H. (2021). *Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan*. 04(02), 6.
- Oktavia, windi tyas, & Aliyah, S. (2022). *Among Makarti Vol. 15 No. 2 (Edisi Khusus Dies Natalis ke-38) – Agustus 2022*. 15(2), 215–232.
- Rachmad, A. (2021). The Effect Of Regional Financial Management Aspects Transparency Of Regional Financial Management In Lumajang Ari Rachmad Perbanas Jakarta Email: ari.rachmad030@perbanas.id. *Ascarya*, 1(1), 78–98.
- Sari, D. (2012). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional*, 718–727.
- Seviani, P., & Budiwinarto, K. (2021). *Surakarta Accounting Review ( SAREV )*. *Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta*, 3(2), 89–100
- Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah Pemerintahan Berbasis Akrual dilakukan dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akrual dan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 5(1), 1357–1368.

- Achmad, J., Saleh, H., & Chahyono, C. (2021). Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran Pada Pemerintah Daerah Luwu Timur. *Indonesian Journal of Business and Management*, 2(2), 105–111. <https://doi.org/10.35965/jbm.v2i2.405>
- BPK. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kurniawan, D., & Rahayu, S. (2019). The Effect Of The Presentation Of Financial Statment And Accessibility Financial Statment On Regional Financial Management Accountability (Case Study in Mataram City Regional Secre). *Management*, 6(1), 705–714. <https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/8743>
- Ledo, D., & Ayem, S. (2017). Pengaruh Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 161–175. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.236>
- Pamungkas, Bambang (2013) *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*, Bandung: Kesatuan Press